



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

**DUGAAN FRAGMENT KUNO:** Pegiat benda cagar budaya menunjukkan fragmen atau pecahan gerabah tempayan di Kropakan, Mranggen, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (30/5/2023). Temuan objek diduga cagar budaya (ODCB) fragmen atau pecahan gerabah tempayan dan batu bata berukuran besar itu diperiksa sisa peninggalan pada era Mataram Kuno.

1.900 WNI MENINGGAL DI LUAR NEGERI

## Presiden: Berantas 'Backing' TPPO

**JAKARTA (KR)** - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas oknum pelindung atau 'backing' dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pasalnya, menurut Mahfud, hal itu kerap menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di Indonesia, selain persoalan birokratis. "Kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat oleh birokrasi, mungkin juga oleh perbacking dan sebagainya," kata Mahfud dalam keterangan pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5).

Karena itu, lanjut Mahfud, Presiden memerintahkan Kapolri untuk memberantas praktik perlindungan ilegal tersebut saat memimpin rapat internal

pemberantasan TPPO. "Tidak ada backing-backing bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara. Backing bagi penegakan hukum adalah negara," katanya.

Mahfud menambahkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, awal bulan ini, dirinya memimpin Pertemuan ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang membahas upaya bersama kawasan dalam mencegah dan memberantas TPPO.

Menurut Mahfud, dalam pertemuan

tersebut negara-negara ASEAN telah meminta Indonesia untuk mengambil kepemimpinan dalam pemberantasan TPPO.

"Karena bagi mereka tindak pidana perdagangan orang ini sudah sangat mengganggu kehidupan bernegara, karena kejahatan lintas negara dan sangat rapih kerjanya," katanya.

Sebelumnya, Mahfud juga menyampaikan, Presiden memerintahkan dilakukan restrukturisasi terhadap Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan dan Pencegahan TPPO. Presiden menyampaikan hal itu selepas memperoleh laporan dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

"Tadi Pak Benny melapor kepada Presiden pada satu tahun saja mayat yang pulang karena tindak pidana perdagangan orang itu mencapai 1.900 lebih," kata Mahfud. (Ant/San)-f

## PERKUAT PEMBUKTIAN KORUPSI BTS Dua Ajudan Jhonny Diperiksa KPK

**JAKARTA (KR)** - Pemeriksaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terhadap enam orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. Para saksi yang diperiksa, dua di antaranya merupakan ajudan Jhonny G Plate.

"Hari ini (Selasa) Jampidsus memeriksa enam orang saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/5).

Mengenai enam saksi yang diperiksa, menurut Ketut adalah MFM selaku Kepala Divisi Lastmile dan Bachaul BAKTI, AW dan NN selaku ajudan Menteri Komunikasi dan Informatika, ES selaku Senior Manager Sales PT Aplikasi Nusantara, I selaku Direktur PT JIG Nusantara Persada, dan BAA selaku Direktur PT Sarana Global Indonesia. Mereka diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penye-

diaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022 atas nama tersangka AAL, tersangka GMS, tersangka YS, tersangka MA, tersangka IH dan tersangka JGP. "Para saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut," kata Ketut.

Terhadap perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,3 triliun, penyidik telah menetapkan tujuh orang tersangka. Para tersangka itu Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia.

Selain itu, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Herman (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy. (Fu)-f

## DIDUGA BERASAL DARI SUAP PERKARA MA KPK Dalam Aset yang Dikelola Windy

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Windy Yunita Ghemary terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Senin (29/5). Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan menerima aliran uang dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Karena dugaan itu, saksi Windy Y didalami terkait penjelasan dan pengetahuan saksi atas dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak yang terkait perkara ini," jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (30/5).

Penyidik KPK, menurutnya, turut memeriksa Windy soal aset yang diduga berasal dari hasil para pihak yang terkait kasus tersebut. Selain itu, saksi ini juga dikonfirmasi terkait dugaan adanya aset-aset yang dikelola saksi.

Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK telah memeriksa Windy terkait kasus tersebut pada Senin (29/5). Usai diperiksa, Windy membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

"Mohon tanya ke penyidik saja, yang pasti saya 100 persen tidak ikut campur dalam kasus ini. Saya dibilang sebagai penghubung apakah, mohon tolong jangan zalim sama saya," kata Windy di Gedung Merah Putih KPK.

Windy juga mengaku tidak mengenal para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. "Saya sama sekali tidak kenal satu pun orang-orang di dalam kasus ini yang tersangka," tambahnya.

Meski demikian, Windy mengaku kenal dengan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan karena urusan pekerjaan. "Dulu kenal saat mendirikan AJP (Athena Jaya Production). Dahulu pernah ada Athena Jaya kan," jelasnya.

Windy mengaku hanya satu bulan berkecimpung di rumah produksi tersebut. "Saya sebulan saja di situ, tetapi kan saya mengundurkan diri karena saya harus sekolah di luar negeri saat itu. Jadi, benar-benar lama tidak tahu tentang Athena Jaya lagi," tegasnya. (Fu)-f

ALIRAN DANA POLITIK

## Belum Ada dari Jaringan Narkotika

**JAKARTA (KR)** - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, lembaga yang belum menemukan atau menerima laporan mengenai indikasi aliran pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika. Ia berharap tidak ada peserta pemilu memanfaatkan pendanaan dari jaringan narkotika untuk berkontestasi pada Pemilu 2024.

"Belum ada. Biasanya, teman-teman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberi tahu, tapi sampai sekarang belum," kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/5).

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri men-

gendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.

Ketika membuka Rapat Kerja Teknis Fungsi Reserse Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta Badung Bali, Rabu (24/5), Wakil Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Kombes Pol Jayadi mengatakan, indikasi tersebut bukan merupakan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.

"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman. Tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada," kata Jayadi. (Ant)-f

TIKET LAGA INDONESIA VS ARGENTINA

## Termurah Rp 600.000, Termahal Rp 4,2 Juta

**JAKARTA (KR)** - Laga FIFA match day antara Indonesia dan Argentina yang akan berlangsung 19 Juni mendatang tinggal menunggu hari. Untuk menyaksikan pertandingan bersejarah ini, PSSI telah menetapkan harga tiket terendah Rp 600.000.

Kepastian harga tiket di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir dalam Konferensi Pers di Ruang Press Conference SUGBK, Senin (29/5). Erick didampingi Wakil Ketua Umum Zainudin Amali, Cak Lontong dan anggota Exco Arya Sinulingga.

Disebutkan, harga tiket yang akan disediakan dibagi dalam beberapa kategori. Termurah, yakni kategori 3 akan dijual de-

ngan harga Rp 600.000 sudah termasuk pajak dan biaya service lainnya. Sedangkan kategori VIP Barat dan Timur dijual sebesar Rp 4.250.000. Tiket kategori 1 dijual dengan harga Rp 2,5 juta, sedangkan tiket kategori 2 dijual dengan harga Rp 1,2 juta. Penjualan tiket mulai dibuka pada 5 Juni khusus untuk pemilih kartu BRI, sedangkan untuk umum akan dibuka 6 dan 7 Juni.

"Kita ingin memberikan service yang terbaik pada masyarakat. Ini sudah termasuk pajak dan service. Rata-rata harga tiket di Rp 1 juta-an. Selain pertandingan yang memperbaiki ranking kita, ada juga yang menguji nyali kita. Mohon dukungannya dari masyarakat," ujar Erick. (Hit)-f

PEMERINTAH IZINKAN EKSPOR PASIR LAUT

## Luhut: Tak Akan Rusak Lingkungan

**JAKARTA (KR)** - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini, kebijakan terbaru Pemerintah yang memperbolehkan pengerukan dan mengekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan.

Kebijakan terbaru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

"Nggak dong (tidak merusak lingkungan). Karena semua sekarang ada global positioning system (GPS) segala macam, kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya ditemui usai acara pelun-

curan Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICSC) di Jakarta, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau diekspor, pasti jauh manfaatnya, untuk BUMN, Pemerintah," imbuhnya. Luhut juga menyebut ekspor pasir laut punya manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan industri, khususnya terkait pendalaman alur laut.

Pengerukan disebutnya justru bermanfaat bagi ekosistem laut karena bisa mengurangi pendangkalan. "Jadi, untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel. Gede sekali solar panel itu," katanya. (Ant/San)-f



DISKOMINFO KOTA SALATIGA

## Kunci Sukses Salatiga Raih Capaian WTP Ketujuh Kalinya dari BPK Perwakilan Jawa Tengah



Pj Wali Kota Salatiga Drs Sinoeng N Rachmadi MM Menyerahkan Penghargaan WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah kepada Kepala BPKPD Salatiga, Drs Adhi Isnanto Didampingi Sekda Salatiga, Ir. Wuri Pudjiastuti MM.

Setiap pemerintah daerah berharap pengelolaan keuangan mendapat capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

Demikian halnya dengan Kota Salatiga, Pemerintah Kota (Pemkot Salatiga) pada pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 dipimpin Penjabat Wali Kota, Drs Sinoeng N Rachmadi, MM, berhasil melanjutkan capaian dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah pada 2023 ini.

Keberhasilan WTP yang ketujuh kalinya ini merupakan kerja keras semua jajaran Pemkot Salatiga tahun 2022 yang dipimpin oleh Sinoeng N Rachmadi.

Bukan hanya berpangku tangan saja, melainkan juga dengan sinergitas antar OPD dan bimbingan teknis terus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga kepada seluruh OPD.

Kepala BPKPD Kota Salatiga Adhi Isnanto dalam hal ini melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKPD Kota Salatiga, Agus Munzil F menjelaskan Salatiga meraih WTP yang ketujuh kalinya ini merupakan kerja sama dari seluruh entitas akuntansi (OPD, BLUD, BUMD).

Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah cukup dinamis menjadi tantangan bagi BPKPD dalam menyesuaikan perubahan regulasi tersebut seperti Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Bagan Akun Standar dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk meningkatkan pema-haman bagi OPD atas pengelolaan keuangan daerah BPKPD senantiasa melakukan upaya-upaya seperti bimbingan teknis untuk penyusunan LKPD, bimbingan teknis pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan sosialisasi perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

BPK atau pemeriksa akan memperhatikan kesesuaian penyajian LKPD sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan yang diatur dalam SAP dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Kota Salatiga.

Keberhasilan ini selanjutnya akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjanjian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disampaikan ke DPRD Kota Salatiga pada bulan Juni 2023.

Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga, Drs Sinoeng N Rachmadi MM mengatakan dirinya sangat bersyukur dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Capaian ini adalah kali ke tujuh yang diraih Pemerintah Kota Salatiga, tentu ini bukan hal yang mudah. Karena mempertahankan juga tidak kalah beratnya, tak kalah sulitnya ketika pada saat meraih 6 kali berturut-turut.

"Saya mohon izin untuk mengucapkan terima kasih dan

nderek mangayubagyo, turut berbahagia dan turut bangga karena saya bertugas sebagai Pj Wali Kota sebagai bagian dari ASN dan Pemkot Salatiga," katanya.

Ia juga berpesan *rumungso biso tapi biso rumungso*, jangan *dumeh*, karena bagi ASN tentu ini membanggakan, tetapi tetap rendah hati. Diharapkan catatan BPK tidak terulang kembali di tahun yang akan datang.

Sinoeng menilai raihannya WTP dari BPK ini merupakan tanda kita sebagai ASN Pemerintah Kota Salatiga dapat meningkatkan pelayanan publik, kinerja pemerintahan, dan peningkatan daya saing.

Atas nama Pemerintah Kota Salatiga, Sinoeng mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang tidak pernah bosan memberikan pendampingan, nasehat, fasilitas dan komunikasi secara periodik.

Hal ini merupakan upaya dan komitmen bersama dari Pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga dan merawat integritas, mewujudkan *good governance* dan *clean governance* on the right track yang benar dan lurus. (Advertorial/Dinas Kominfo Salatiga)